

DISKONTINUITAS KOTA KREATIF PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

Nur Mahya Maulidya – 14010115120016

maulidyanurmahya@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP , M.PP

alfirdaus_laila@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Collaborative Governance menjadi salah satu strategi tata kelola pemerintahan yang memiliki stigma positif dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jika ditelisik lebih dalam bukan berarti teori ini tidak memiliki sisi lain sebagai celah. Melalui program kota kreatif Pekalongan, perspektif *Collaborative Governance* menarik untuk dikaji melihat bahwa 5 tahun menyandang predikat kota kreatif belum mengalami perkembangan, bahkan masyarakat jauh lebih mengenal Kota Bandung sebagai kota kreatif. Dengan diperkuat melalui penelitian secara kualitatif, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif tidak terjadi karena prosesnya yang memang tidak sederhana. Tidak cukup hanya melihat peran dan hubungan, tetapi aspek politis sebagai bentuk rasionalitas para aktor yang terdapat dalam hubungan tersebut. Penelitian ini berargumen bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor kota kreatif Pekalongan belum berjalan dengan baik. Terdapat dominasi pemerintah yang menyebabkan perkembangan beberapa program usulan aktor lain tidak dapat terealisasi. Sementara disisi lain, dominasi pemerintah juga diperlukan karena Kota Kreatif akan berkaitan dengan jaringan kota kreatif daerah lain yang tentunya memerlukan campur tangan pemerintah.

KATA KUNCI

Collaborative Governance, Kota Kreatif, Kota Pekalongan

Pendahuluan

Collaborative Governance yang selanjutnya dalam jurnal ini disingkat menjadi CG, merupakan tata kelola pemerintahan yang membawa keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah. Strategi ini membawa satu atau lebih aktor yang terlibat. CG biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada, terutama terkait Kota Kreatif Pekalongan yang masih relatif minim kajian dengan fokus pada teori CG.

Umumnya, penelitian tentang *Collaborative Governance* banyak membahas mengenai masalah yang mendesak untuk segera dicari jalan keluar, pembahasan yang ditulis secara teknis sesuai dengan teori tanpa melihat fakta lain yang masih dapat digali dari suatu kasus. Penelitian ini berusaha untuk melihat pemerintahan kolaboratif yang dilakukan di Kota Pekalongan dalam mewujudkan kota kreatif. jarang sekali rujukan yang membahas kota kreatif Pekalongan. Hal ini disebabkan karena Kota Pekalongan belum mampu bergerak secara masif dalam mengembangkan kota kreatif seperti Kota Bandung, sehingga meskipun Kota Pekalongan menjadi Kota Pertama di Indonesia yang mendapatkan predikat kota kreatif, namun perkembangannya masih tertinggal oleh Kota Bandung yang sering sekali menjadi rujukan berbagai daerah. Dengan fakta demikian, dipastikan ada sesuatu yang menjadi penghambat perkembangan Kota Kreatif Pekalongan. Minimnya sorotan akademisi dengan Kota Pekalongan tidak berarti dimaknai bahwa Kota Pekalongan tidak memiliki masalah yang begitu serius untuk diperhatikan. Terlebih yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dan konsep kota kreatif.

Beberapa literasi penting yang relevan, beberapa yang menarik terkait *Collaborative Governance* diantaranya penelitian Tika (2017) yang menggunakan teori dari De Se Ve dimana terdapat indikator terjadinya *Collaborative Governance*. Indikator tersebut penting untuk dijadikan referensi dalam melihat bagaimana proses hubungan kolaborasi mulai berlangsung. penelitian tersebut juga sejalan dengan Fajrina (2018) yang melihat bahwa indikator kolaborasi itu penting. Peneliti mencoba memandang berbeda dengan mencari celah *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash, pandangan terkait kolaborasi tidak selalu berpatokan pada indikator yang harus dipenuhi, namun juga melihat ada tidaknya kepentingan dibalik hubungan aktor-aktor tersebut. hal tersebut perlu untuk digali mengingat tidak signifikannya Kota Kreatif Pekalongan, kemudian Jihan (2019) mendeskripsikan dengan jelas bagaimana keberlanjutan kota kreatif Pekalongan. Hasilnya menunjukkan bahwa kota kreatif seakan menjadi program yang mati suri dan menjadi hal yang dikesampingkan oleh pemerintah. Ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat terutama warga Kota Pekalongan yang tidak mengerti mengapa menjadi kota kreatif, apa benefit dari penghargaan tersebut, dan apa yang seharusnya mereka dukung dan fokus untuk mengembangkan Kota Pekalongan. Belum terdapat penelitian terkait kota kreatif yang dilihat dari perspektif *Collaborative Governance*, penelitian Jihan (2019) cukup menarik karena membahas keberlanjutan Kota Kreatif Pekalongan, meskipun menarik ada beberapa hal yang tidak terbahas, yaitu rasionalitas para aktor yang berkolaborasi, bagaimana para aktor membawa kepentingan mereka. Hal tersebut yang akan turut peneliti dalam, secara berbeda akan melihat bahwa kolaborasi memang bukan proses yang sederhana.

Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan sebagai pengaturan pemerintah dimana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif yang formal, bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. CG tidak hanya sebatas stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah, tetapi juga multipartner governance yang meliputi sektor private, masyarakat komunitas sipil, dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti kerjasama publik-privat dan privat sosial (Agrawal dan Lemos 2007).

Pemerintahan kolaboratif dilakukan karena melihat adanya kebijakan yang kurang berhasil baik dalam implementasi maupun secara finansial. Masalah yang ditemui juga berbeda-beda sehingga bentuknya CG juga akan berbeda tiap daerah. Dalam penelitian Tika (2017) menyebutkan indikator keberhasilan CG, menurut DeSeVe ada beberapa tingkatan yaitu: Struktur jaringan, Komitmen, Kepercayaan, Governance, Berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.

Praktik CG bukan merupakan proses yang sederhana. Semakin banyak kepala yang menjalin hubungan, maka semakin butuh banyak penyesuaian. Seringkali pada implementasinya bersifat hierarki, kemudian muncul bahwa kolaborasi hanya sebagai formalitas. Tarik menarik kepentingan juga pasti terjadi, sehingga akan banyak program yang terabaikan jika tidak sesuai dengan kepentingan penguasa.

Teori yang dibawa oleh Chris Ansel dan Alison Gath (2007) dipandang sebagai konsep yang ideal, padahal memiliki celah pada rasionalitas para aktor dibalik keputusannya. Sejatinya dalam politik akan selalu membahas apa, siapa, dan mendapatkan apa. Sehingga kolaborasi akan kental dengan nilai politis.

Penghargaan kota kreatif Pekalongan menarik untuk dilihat dari sisi kolaborasi. Selama 5 tahun ini, Kota Pekalongan belum juga berkembang secara signifikan. Dapat dikatakan jauh tertinggal dari Kota Bandung. Dikatakan bahwa para aktor terkait melakukan kolaborasi, namun tidak menghasilkan kemajuan. Sehingga dapat terlihat bahwa kolaborasi yang dilakukan hanya bersifat formalitas saja.

Kota Kreatif Pekalongan dalam Perspektif *Collaborative Governance*

Kota Pekalongan merupakan daerah strategis yang berada pada jalur pantura yang sangat aktif. Sehingga menjadi salah satu kota perdagangan yang cukup besar. Selain pantura, Kota Pekalongan memiliki pelabuhan dan perikanan yang pernah menjadi nomor 1 di Indonesia. Tentunya mempengaruhi penduduk yang menetap di Kota Pekalongan seperti Cina, Arab, dan para pendatang nusantara yang berasal dari berbagai suku. Mayoritas beragama Islam, dengan minoritas Kristen, Katholik, Budha, dan Kong Hu Cu. Meski memiliki keragaman suku dan agama, Kota Pekalongan masih kondusif dalam menjaga ketentraman dan toleransi agama.

Keberagaman penduduk di Kota Pekalongan turut mempengaruhi budaya yang ada, salah satunya Batik yang memang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Banyak motif batik yang dipengaruhi oleh budaya Cina dan Arab. Sejarah batik yang sudah lama berkembang menjadi alasan pemerintah memilih batik sebagai lokomotif ekonomi di Kota Pekalongan.

Aktor-aktor Kolaborasi Kota Kreatif

Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa dalam pembentukan kota kreatif, pemerintah benar-benar melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti melibatkan aktor bisnis, masyarakat, menggandeng akademisi, dan juga media sebagai sarana publikasi kota kreatif, pemerintah menyebutnya dengan konsep pentahelix. Adapun aktor utamanya yaitu Pemerintah, Swasta (Pengusaha/Bisnis), Masyarakat. Sedangkan aktor pendukungnya yaitu Akademisi, PCCF (Pekalongan Creative City Forum), dan Media. Peran dari masing-masing aktor sebagai berikut :

Aktor	Peran
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan industri batik • Mengilmiahkan batik • Menyiapkan infrastruktur pendukung kota kreatif • Menciptakan event berbasis batik • Memfasilitasi masyarakat
Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai komunitas pencinta batik • Menghidupkan museum batik • Sebagai penggerak industri batik • Sebagai aktor yang paling memberdayakan masyarakat setempat • Kolaborasi dalam event berbasis batik • Salah satu aktor pelestarian budaya batik
Masyarakat sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor utama dalam perkembangan batik • Sebagai komunitas yang mendukung dan menghidupkan kota kreatif • Berinovasi membentuk kampung-kampung batik
Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengilmiahkan batik • Penghubung antara Kota Pekalongan dengan Kota Kreatif dunia • Melakukan riset terkait bahan baku batik • Melakukan riset terkait limbah di Kota Pekalongan • Sebagai narasumber diberbagai acara atau konferensi terkait budaya dan kota kreatif
PCCF	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai forum yang mewadahi seluruh komunitas • Berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat secara langsung • Penghubung Kota Pekalongan dengan ICCF • Aktif dalam pengadaan event terkait budaya batik,
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Alat publikasi dan dokumentasi terkait kota kreatif • Dikoordinasikan oleh Kominfo • Berkolaborasi dengan media luar daerah Kota Pekalongan

Mekanisme Kolaborasi Aktor

Karena kolaborasi tidak bisa terjadi dalam ruang hampa, maka peneliti harus melihat konteks tujuan dan motivasi dari pelaku alasan mengapa berkolaborasi. Ada beberapa tingkatan kolaborasi mengutip dari *O'Flynn and John Wanna (2008,4)* dalam penelitian Riva (2015), ada skala tingkat kolaborasi yaitu tertinggi, menengah-tinggi, menengah, menengah-rendah, dan terendah. Dari tingkatan tersebut, kolaborasi kota kreatif Pekalongan ada pada tingkatan menengah-tinggi.

Bentuk Kolaborasi	Realita
Membawa batik ke sekolah – sekolah	Berjalan dengan baik hingga sekarang, terbukti dengan adanya jurusan batik di SMKN 3 Pekalongan, Prodi Batik Unikal, dan Polbat
Menggerakkan industri batik melalui pasar	Pemerintah hanya memfasilitasi diawal, seterusnya masyarakat yang juga sebagai pengusaha batik kecil berdiri sendiri menghidupkan pasar grosir batik setono
Pekan Batik Nusantara /internasional	Dalam kegiatannya cenderung dominasi PCCF dan masyarakat. Pemerintah dianggap hanya melakukan klaim acara. Pemerintah juga mengadakan pameran batik dengan pengusaha yang memiliki relasi. Sehingga pada realitanya terdapat konflik kepentingan antar aktor.
Menghidupkan museum sebagai sarana pameran dan pelatihan membatik	Pada realitanya museum mulai dihidupkan oleh para pengusaha yang tergabung dalam komunitas pecinta batik. Namun untuk kepentingan tersendiri akhirnya menjadi klaim pemerintah.
Membantu kampung kreatif	Pada awalnya pemerintah menjadi pemancing terbentuknya kampung batik kauman. Yang kemudian diikuti oleh munculnya kampung batik lain yang dibentuk mandiri oleh masyarakat dan pengusaha. Namun terdapat perbedaan kepentingan yang justru membuat perkembangan kampung kreatif di Pekalongan menjadi hidup segan mati tak mau
Mengikuti konferensi kota kreatif	Kolaborasi ini mengesampingkan aktor lain. Realitanya hanya pemerintah yang sering mengirimkan delegasinya untuk mengikuti konferensi dengan alasan laporan pertanggung jawaban.
Riset terkait bahan baku batik dan limbah batik	Realitanya hanya dilakukan oleh akademisi saja, pemerintah hanya menerima laporan hasil akhir.
Event terkait budaya batik	Kolaborasi memang dilakukan, namun yang paling menonjol adalah kolaborasi pccf-akademisi-masyarakat.
Dokumentasi, publikasi, press release terkait kota kreatif	Tidak ada kolaborasi. Fakta di lapangan bahwa untuk acara yang dilakukan seringkali tidak difasilitasi dengan dokumentasi dari media. padahal keberadaannya penting sebagai sarana promosi event di Kota Pekalongan
Berbagi informasi kota kreatif	Sharing informasi dalam proses kolaborasinya berjalan baik, sehingga program masing-masing dapat berjalan meskipun dapat dikatakan berjalan sendiri-sendiri

Kolaborasi yang dilakukan, ada yang memang berjalan dengan baik, namun ada yang tidak berjalan dengan baik. Adapun hambatan dari proses kolaborasi yang tidak berjalan karena :

1. Partisipasi swasta dan masyarakat sipil rendah.
2. Pergantian pemerintahan sebagai penghambat program.
3. Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan di internal pemerintah.
4. Tidak terdapatnya anggaran.
5. Kendala komunikasi antar aktor.

***Collaborative Governance* sebagai Proses yang Tidak Sederhana**

Proses kolaborasi tidak semudah ekspektasi, Kolaborasi mudah saja dilakukan, namun diperlukan komitmen dari berbagai pihak. Beberapa pengusaha penting seperti Ibu Fatiyah, Bapak Ediwan, Balqis Diab menjadi pengusaha yang cukup aktif dalam kota kreatif. sebelum itu mereka sudah lebih dulu berkolaborasi dengan pemerintah, namun hal itu menunjukkan bahwa para pengusaha yang diikutsertakan adalah yang memiliki relasi dengan pemerintah saja. Ini jelas mengundang banyak pertanyaan mengapa dari sekian banyak pengusaha batik baik yang besar maupun kecil hanya mereka yang diikutsertakan, lebih spesifik lagi batik Gies milik Balqis Diab yang pada masa pemerintahan suaminya yaitu Basyir Ahmad menjadi pengusaha yang paling menonjol ketika UNESCO menyambangi Kota Pekalongan. Sehingga disini kolaborasi dengan pengusaha juga sulit diciptakan secara sehat.

Aspek Politis *Collaborative Governance* Berkaca dari Kasus Program Kota Kreatif

Aspek politis sebenarnya terlihat kental terkait kota kreatif Pekalongan. Secara tidak langsung kota kreatif merupakan hasil ambisi dari inisiator yang sebenarnya konsepnya kurang matang.

Indikasi kepentingan politik pribadi karena melihat daftar para pengusaha yang dicantumkan dalam proposal pengajuan kota kreatif adalah pengusaha yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, sementara untuk pengusaha kecil-menengah tidak diikutsertakan, hal ini juga didukung kuat oleh penelitian *Amalinda Savirani (2015)* bahwa terdapat indikasi kepentingan politik melalui usaha batik milik Balqies Diab, istri Basyir Ahmad yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pekalongan. Terkait museum batik yang mendapatkan penghargaan *best practice* dunia dan diikuti dengan penghargaan kota kreatif, UNESCO menghadiri pertemuan di Kota Pekalongan. Semua tamu undangan mendapatkan souvenir Gies Batik. Padahal masih banyak pengusaha lain yang harusnya juga dilibatkan.

Bekerja Tidaknya *Collaborative Governance*

Pertama, komunikasi yang kurang efektif dengan aktor kota kreatif. persoalan kesalahpahaman antar aktor, terutama terkait informasi kota kreatif yang seringkali tidak tersampaikan dengan aktor lain. *Kedua*, pembagian kewenangan yang tidak jelas sehingga berdampak berhentinya program kota kreatif karena tupoksi yang tidak jelas seperti penemuan peneliti bahwa Bappeda justru yang memperbarui data-data kota kreatif di website resmi, sementara terkait media seharusnya dibawah kewenangan kominfo. *Ketiga*, masyarakat yang tidak tau alasan mengapa Kota Pekalongan menjadi kota kreatif, sementara mereka tidak merasakan dampak ekonomi secara signifikan.. *Keempat*, tidak bekerjanya kolaborasi karena secara teori *collaborative governance* menuntut bertatap mukanya para stakeholder untuk memecahkan masalah. Sementara diakui oleh salah satu aktor yaitu Bappeda bahwa kolaborasinya sekarang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan program masing-masing. Keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tidak sepenuhnya disebabkan dari sistem pemerintahan, namun juga para aktor yang diajak bekerja sama.

Tidak Berlanjutnya Program Kota Kreatif

Kategori *Folk Art* yang faktanya tidak ada di Kota Pekalongan. Pemerintah pada kala itu sangat kuat ber retorika tentang batik Kota Pekalongan, namun melupakan bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencari kesenian rakyat.

Perbedaan pandangan pemerintah sebelum dan sesudahnya juga menjadi penyebab program kota kreatif tidak jelas. Basyir Ahmad cenderung menggemborkan perekonomian batik, sementara Saenary lebih berfokus pada kegiatan religius. Beliau terlihat ingin menciptakan citra pemimpin NU yang religi tetapi mengesampingkan program-program yang sebenarnya jauh lebih potensial apabila dikembangkan dan dilanjutkan dengan matang.

PCCF yang menjadi wadah komunitas kota kreatif menjadi batu sandaran satu-satunya yang diharapkan dapat melanjutkan kota kreatif, namun hubungannya dengan pemerintah yang tidak terlalu harmonis karena perbedaan pandangan dan kepentingan membuat program PCCF sulit untuk dijalankan sendiri.

Birokrasi yang Lemah

Kolaborasi yang dilakukan memang menunjukkan dominasi yang kuat oleh pemerintah. Namun bukan berarti dominasi akan selalu bagus atau memiliki nilai lebih. Cara birokrasi melaksanakan program kota kreatif memberikan gambaran yang menunjukkan kepada kita khususnya masyarakat Kota Pekalongan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius dalam melanjutkan kota kreatif, mereka percaya dengan mindset bahwa masyarakat Kota Pekalongan akan tetap kreatif meski tidak diperhatikan. Berikut kelemahan birokrasi :

1. Inisiatif walikota tidak mempertimbangkan kesiapan birokrasi

Pengajuan proposal tidak mempertimbangkan kesiapan masing-masing dinas. Perencanaan yang kurang menyebabkan terhambatnya program yang akan dilanjutkan. Inisiatif Basyir dalam mengajukan diri sebagai Kota Kreatif juga menyebabkan pemerintah menjadi dominan dalam hampir semua hal yang tidak berujung dalam satu masalah saja.

2. Pembagian tugas birokrasi terkait Kota Kreatif tidak jelas

Kota kreatif ini tidak bisa ditangani oleh satu badan pemerintah atau satu dinas saja karena banyak aspek yang menjadi fokus dalam kota kreatif. Birokrasi yang menangani tidak terstruktur secara jelas memegang program tersebut. seperti contoh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang tidak mengerti jelas kewenangan dan andilnya dalam kota kreatif karena memang tidak memiliki program dan anggaran yang dicantumkan dalam RPJMD. Birokrasi masih menggunakan sistem lama

Sistem yang dari dulu ada dalam birokrasi adalah kaku dan mengacu pada laporan pertanggung jawaban. Seperti halnya yang masih ada dalam birokrasi Kota Pekalongan, banyak kegiatan terkait kota kreatif yang tidak dapat dilaksanakan atau diberikan *back up* pemerintah dengan alasan menyulitkan laporan pertanggung jawaban.

3. Koordinasi internal yang masih kurang

Terlibatnya berbagai dinas dalam program kota kreatif menuntut koordinasi dan komunikasi yang kuat. Dengan adanya pembagian kewenangan yang memang kurang jelas maka menunjukkan bahwa koordinasi internalnya masih kurang. Koordinasi terjalin ketika terdapat kepentingan, seperti untuk pelaporan perkembangan kota kreatif ke UNESCO. Sifatnya hanya formalitas. Dari sini dapat dilihat bahwa dominasi pemerintah yang kuat tidak selalu berjalan lurus dengan koordinasinya. Karena yang kuat saat itu hanya ambisi wali kota, sehingga ketika sudah tidak memimpin maka koordinasinya juga menjadi lemah.

4. Upaya branding Kota Kreatif masih lemah

Seperti yang kita tahu bahwa branding pemerintah Kota Bandung sebagai Kota Kreatif sangat kuat dan dapat terlihat perkembangannya. Sebagai sesama Kota Kreatif UNESCO nampaknya memiliki perbedaan terkait upaya branding yang dilakukan. Kota Bandung sendiri selain memiliki kepala daerah yang aktif membranding juga memiliki komunitas yang menjadi dasar kuatnya branding tersebut. Sementara Kota Pekalongan tidak memiliki hal tersebut. Kepala daerah yang mengalami pergantian tentunya memiliki fokus yang berbeda, namun sebenarnya untuk daerah yang memiliki predikat Kota Kreatif diperlukan sosok pemimpin dan birokrasi yang melek teknologi serta luwes dalam penggunaannya. Jika kita lihat dalam kepemimpinan Ridwan Kamil saat menjadi Wali Kota Bandung, beliau aktif branding melalui akun media sosial pribadi. Sementara untuk Kota Pekalongan masih bersifat sangat formal.

Media sebagai salah satu aktor birokrasi yang belum mampu dalam membranding Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif, beberapa hal terkait publikasi kota kreatif rata-rata dilakukan saat awal pengajuan kota kreatif, untuk keberlanjutannya justru kurang jelas.

5. Kurangnya program yang berkelanjutan

Program yang tidak berkelanjutan, hal tersebut berhubungan dengan sistem laporan pertanggung jawaban sehingga birokrat sibuk dengan hasil akhir bukan dengan substansi yang diperoleh. Beberapa program kota kreatif banyak yang tidak berlanjut atau tidak menemui kejelasan seperti keberlanjutan kampung batik kauman yang sudah dianggap gagal oleh pemerintah sendiri sehingga mereka enggan untuk melanjutkan program dari kampung batik pesindon dan memilih program baru yang dianggap jauh lebih matang.

6. Kurangnya penghargaan birokrasi terhadap partisipasi stakeholder lain

Sudarmo (2009) menyebutkan bahwa kolaborasi bisa gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau stakeholder lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan. Dari hasil wawancara dengan PCCF, pengusaha, dan masyarakat sipil menggambarkan bahwa kelemahan birokrasi ini tidak menghargai partisipasi dari stakeholder. Hubungan kolaborasi akan selalu menuntut kerja sama, namun diperlukan juga komunikasi yang baik antar anggotanya. Pemerintah tidak menunjukkan suatu penghargaan yg menyebabkan mereka enggan berpartisipasi membantu pemerintah, sehingga pada akhirnya berjalan sendiri-sendiri yang mana menghambat keberlanjutan kota kreatif.

Penutup

Kolaborasi antar aktor kota kreatif Pekalongan tidak berjalan. Sehingga melihat Kota Kreatif Pekalongan dalam perspektif *Collaborative Governance* dapat dikatakan tidak berlanjut. Adanya dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor bahwa kolaborasi itu tidak terjadi.

Aktor-aktor kolaborasi yang terdiri dari ABCG+M justru berjalan sendiri-sendiri karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan, dalam hal ini masyarakat yang paling dirugikan karena dampak dari kota kreatif belum dirasakan oleh masyarakat. Sifat egoisme dari Wali Kota periode 2016-2021 membuat kota kreatif justru terbengkalai. Diskontinuitas kota kreatif Pekalongan ini terjadi karena program yang diusulkan, baik usulan dari masyarakat, PCCF, maupun forum FEDEP yang dibentuk di era pemerintahan saat ini juga tidak mendapatkan persetujuan untuk direalisasikan oleh wali kota, disini selain pemerintah mendominasi terdapat pula perbedaan kepentingan antara wali kota periode 2005-2015 dengan wali kota baru periode 2016-2021. Melihat fakta tersebut, ditambah dengan kurangnya forum sebagai saran komunikasi antar aktor maka kemungkinan besar kota kreatif akan sulit dilanjutkan di Kota Pekalongan. Penelitian ini juga menjawab adanya celah dari teori *Collaborative Governance* Ansel dan Gash (2007) bahwa teori ini melupakan pembahasan mengenai rasionalitas para aktor.

Menjelaskan penelitian ini dari segi kolaborasi masih kurang cukup, melihat fakta di lapangan bahwa dominasi pemerintah ini sangat kuat cukup menarik untuk diperdalam dengan hanya fokus mengaitkan pada aspek politik, dan kekuasaan. Kondisi internal pemerintah juga dapat dilihat sebagai alasan perkembangan kota kreatif Pekalongan yang tidak mengalami kemajuan. Mengaitkan dengan teori populisme yang digunakan pemerintah juga menarik untuk melihat sisi lain dari program kota kreatif Pekalongan. Selain itu, fakta bahwa PCCF juga cukup aktif secara mandiri, maka dapat difokuskan pula pembahasan kota kreatif yang memiliki basis komunitas yang dapat dikaitkan dengan tarik menarik kepentingan pemerintah. Pembahasan peran masing-masing aktor serta hubungan antar aktornya menjadi batasan dari penelitian ini dan masih banyak variabel yang kurang mewakili, sehingga menggunakan mix methode akan lebih memperdalam data dalam penelitian selanjutnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah menyempatkan waktu untuk membantu berlangsungnya proses penelitian, serta seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Anisa Nur Nia Rahmah. 2019. *Pasang Surut Populisme : Satu Dekade Populisme Basyir Ahmad di Pekalongan*. Fisipol UGM. PolGov.
- Ansell, C. Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance In Theory And Practice Journal Of Public Administration Research And Theory*. University of Californi: Berkeley.
- Aribowo, Handy. Alexander. Yudithia. *Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik*. STIE IBMT. Surabaya. JURNAL MEBIS. ISSN : 2599-283X
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Maya. Latifah. 2015. *Strategi Kota Pekalongan dalam Pengembangan Wisata Kreatif Berbasis Industri Batik*. Jurnal Pengembangan Kota. Volume 3 Nomor 2 (100-111).
- Dewi, Ratna T. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Donahue, J. Richard Z. 2011. *Collaborative Governance (Private Roles for Public Goals in Turbulent Times)*. Princeton University Press: Princeton and Oxford.
- Emerson, Kirk. Et all. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory. Oxford University.
- Hayati, Riva. 2015. Dalam Skripsi *Dampak Kebijakan Perda No.4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dalam Perspektif Collaborative Governance*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Irawan, Denny. 2017. *Collaborative Governance Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5 Nomor 3.
- Junaidi. *Collaborative Governance dalam upaya menyelesaikan krisis listrik di Kota Tanjung Pinang*. Jurnal Publikasi. FISIP UMRAH.
- Manisah, Miranti. 2009. *Kota Kreatif Penelusuran terhadap Konsep Kota Kreatif melalui Pengamatan Studi Kasus*. Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Depok
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mutiawati, Tika. 2017. *Collaborative Governance dalam penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik. Vol 1 No.2.
- Subarsono, Agustinus. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. FISIPOL UGM. Gava Media.

Sufianti, Sawitri, dan Nur Pribadi. *Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi pada Masyarakat Nonkolaboratif*. Mahasiswa dan Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB. Vol.29, No.2. 133-144.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Suharyanto. 2005. *Administrasi Publik : Entrepreneurship, Kemitraan dan Reinventing Government*. Media Wacana. Yogyakarta. Hal 92.

Syahidah, Jihan Amalia. 2019. Dalam Tesis *Keberlanjutan UNESCO CREATIVE CITY NETWORK di Kota Pekalongan*. Magister Ilmu Politik. UNDIP.

<https://ekon.go.id/berita/view/kunci-utama-pengembangan-kota.2180>.(diakses pada tanggal 01 Juni 2018)

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150601110604-277-56910/alasan-pekalongan-dipilih-jadi-kota-kreatif-unesco> (diakses pada tanggal 15 Mei 2018)

Daftar Narasumber

dr. Basyir Ahmad Syawie, Wali Kota Pekalongan Tahun 2005-2015, 19 April 2019, pukul 08.00 WIB.

Retno Purnomo, Kepala Sub Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Wilayah BAPPEDA Kota Pekalongan, 12 April 2019, pukul 09.00 WIB.

Sigit, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Pekalongan, 15 Mei 2019, pukul 08.00 WIB.

Trias Aditya, Anggota Pekalongan Creative City Forum, 26 April 2019, pukul 10.00 WIB.

Dimas, staff dokumentasi dan publikasi KOMINFO Kota Pekalongan, 16 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

Budi, Masyarakat Kampung Wisata dan Batik Pesindon, 21 April 2019, pukul 17.00 WIB.

Drs. Eddywan, Owner Batik Larissa, 22 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

Fatihah, Owner Batik Tobal dan Ketua Paguyuban Pecinta Batik, 25 April 2019, pukul 11.00 WIB.

Tentang Penulis

Nur Mahya Maulidya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.